



## TANTANGAN DAN HARMONI ANTARA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMILU SERENTAK DI INDONESIA

Deden Ilham Rahmani<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, E-mail: Dheden1998@gmail.com

---

### Abstrak

Pemilu serentak di Indonesia merupakan salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi negara ini. Sejak era reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah berhasil melaksanakan beberapa pemilu serentak yang melibatkan pemilihan presiden, anggota parlemen, dan tingkat pemerintahan daerah. Pemilu serentak ini melibatkan jutaan pemilih dan melibatkan berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilu, partai politik, calon, dan masyarakat secara luas. Metode penelitian yang diterapkan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif yang digambarkan melalui laporan verbal untuk menjelaskan dan menggambarkan informasi yang telah dikumpulkan. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan, dan sumber data sekunder yang merupakan informasi yang sudah ada sebelumnya. Tantangan keadilan dalam pemilu serentak di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap integritas proses demokratis. Ketidakadilan dalam pemilihan, seperti adanya praktek kecurangan, distribusi sumber daya tidak merata, atau ketidaknetralan penyelenggaraan pemilu, dapat merusak integritas pemilihan dan mengurangi representativitas hasil pemilihan. Ketika pemilih merasakan adanya ketidakadilan, mungkin kehilangan kepercayaan terhadap sistem demokrasi dan meragukan legitimasi pemerintahan yang dihasilkan dari pemilihan tersebut. Untuk mengatasi tantangan keadilan dalam pemilu serentak di Indonesia, perlu adanya komitmen yang kuat untuk memperkuat integritas dan representativitas proses demokratis.

**Kata Kunci:** Tantangan, Harmoni, Keadilan, Pemilu Serentak

---

### 1. Pendahuluan

Pemilu serentak di Indonesia merupakan salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi negara ini. Sejak era reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah berhasil melaksanakan beberapa pemilu serentak yang melibatkan pemilihan presiden, anggota parlemen, dan tingkat pemerintahan daerah. Pemilu serentak ini melibatkan jutaan pemilih dan melibatkan berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilu, partai politik, calon, dan masyarakat secara luas (Dewi, 2019). Meskipun demikian, pemilu serentak juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Indonesia memiliki keberagaman geografis, sosial, dan politik yang kompleks. Tantangan ini mencakup keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah, tantangan logistik dalam mendistribusikan surat suara, dan masalah keamanan dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama pemilu (Susila Wibawa, 2019).

Selain itu, penting untuk menjaga keadilan dalam pemilu serentak. Keadilan memastikan bahwa semua pemilih memiliki akses yang adil untuk memilih sesuai dengan keyakinan politik mereka. Perlakuan yang setara terhadap partai politik dan calon juga menjadi aspek penting untuk menjaga integritas pemilu. Pemilu yang adil harus mampu menghindari praktik-praktik kecurangan seperti

money politics, politik identitas, dan pelanggaran hukum lainnya (Haris Zulkarnain & Saufi, 2021). Di sisi lain, pemilu serentak juga harus memastikan kepastian dalam proses pemilihan. Kepastian ini melibatkan kejelasan dalam peraturan dan prosedur pemilu, transparansi dalam pemrosesan dan penghitungan suara, serta keabsahan hasil pemilu yang dapat dipercaya oleh masyarakat (Frenki, 2016). Tanpa kepastian ini, demokrasi menjadi rentan terhadap ketidakpuasan, ketidakpercayaan, dan konflik politik.

Oleh karena itu, penting untuk menghadapi tantangan ini dengan mencari harmoni antara keadilan dan kepastian dalam pemilu serentak di Indonesia (Faiza, 2019). Harmoni ini dapat dicapai melalui upaya yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk penyelenggara pemilu, partai politik, calon, dan masyarakat. Langkah-langkah seperti meningkatkan kesadaran dan pendidikan politik, peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, dan penggunaan teknologi yang aman dan terpercaya dapat membantu menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepastian. Dalam konteks perubahan sosial, politik, dan teknologi yang terus berkembang, penting untuk terus mengkaji dan memperbaiki sistem pemilu di Indonesia (Fahmi, 2016). Evaluasi terus-menerus dan perbaikan yang dilakukan dapat membantu mengatasi tantangan yang muncul dan memperkuat integritas pemilu. Dengan menjaga keadilan dan kepastian, pemilu serentak di Indonesia dapat menjadi sarana yang mendorong partisipasi politik yang luas, memperkuat demokrasi, dan membangun masyarakat yang adil dan demokratis (Manurung, 2019).

Kebaharuan dari naskah yang ditulis terletak pada pendekatan yang menggabungkan dua aspek krusial dalam pemilu serentak di Indonesia, yaitu keadilan dan kepastian. Dalam banyak diskusi mengenai pemilu, sering kali aspek keadilan dan kepastian dipisahkan menjadi dua isu yang berbeda. Namun, naskah ini menghadirkan gagasan bahwa kedua aspek ini saling terkait dan harus dijaga dalam harmoni untuk menjaga integritas pemilu. Selain itu, naskah ini juga mencerminkan situasi aktual di Indonesia, dengan fokus pada pemilu serentak. Pemilu serentak telah menjadi tren yang semakin populer di berbagai negara, dan di Indonesia, pemilu serentak telah menjadi bagian penting dari perjalanan demokrasi setelah reformasi. Dalam konteks ini, naskah ini memberikan sorotan pada tantangan dan dinamika khusus yang dihadapi oleh Indonesia dalam melaksanakan pemilu serentak, yang melibatkan pemilihan presiden, anggota parlemen, dan tingkat pemerintahan daerah secara bersamaan.

Melalui pendekatan ini, naskah ini menawarkan sudut pandang yang komprehensif dan relevan dalam menghadapi tantangan pemilu serentak, sekaligus mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan dan kepastian. Selain itu, pembahasan mengenai pengaruh teknologi dalam pemilu dan tantangan terkait privasi dan keamanan data juga mencerminkan perkembangan terbaru dalam konteks pemilihan umum. Dengan menggabungkan konsep keadilan dan kepastian dalam pemilu serentak di Indonesia, serta mempertimbangkan isu-isu aktual yang muncul, naskah ini memberikan kontribusi baru dalam pemahaman dan diskusi mengenai demokrasi, pemilu, dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara dalam menjaga integritas pemilihan umum.

Konteks pemilu serentak di Indonesia, beberapa permasalahan yang umumnya muncul dalam penelitian tentang pemilu serentak dapat mencakup koordinasi dan logistik: Pemilu serentak melibatkan berbagai jenis pemilihan secara bersamaan, yang dapat menimbulkan tantangan logistik dan koordinasi yang kompleks. Permasalahan ini dapat mencakup distribusi surat suara, pemilihan tempat pemungutan suara yang tepat, dan penempatan petugas pemilu. Keadilan dan perlakuan yang setara: Penting untuk memastikan bahwa semua partai politik dan calon mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam pemilu serentak. Tantangan dalam memastikan keadilan meliputi penanganan keluhan dan sengketa pemilu, serta mencegah praktik-praktik kecurangan. Pengaruh teknologi: Penggunaan teknologi dalam pemilu serentak dapat memberikan manfaat seperti efisiensi dalam pemrosesan suara, namun juga dapat menimbulkan tantangan seperti

masalah privasi dan keamanan data, serta ketidakmampuan sebagian masyarakat dalam mengakses teknologi.

## 2. Metode

Artikel ini menggambarkan jenis penelitian lapangan (field research) yang menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan ini berfokus pada penyelidikan langsung terhadap masalah yang terjadi di lapangan yang terkait dengan subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berusaha menciptakan gambaran yang komprehensif dengan mengeksplorasi kata-kata, mendokumentasikan laporan terperinci dari perspektif responden, dan menyelidiki situasi yang dialami. Metode penelitian yang diterapkan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif yang digambarkan melalui laporan verbal untuk menjelaskan dan menggambarkan informasi yang telah dikumpulkan. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan, dan sumber data sekunder yang merupakan informasi yang sudah ada sebelumnya (Sugiyono, 2013).

**Analisis Literatur:** Langkah awal dalam penelitian ini adalah melakukan analisis literatur yang komprehensif mengenai pemilu serentak, tantangan keadilan dan kepastian dalam konteks pemilu serentak, serta pengaruh teknologi dalam pemilihan umum. Analisis literatur ini akan melibatkan pencarian dan peninjauan terhadap buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.

**Studi Kasus:** Untuk memahami secara lebih mendalam tantangan dan harmoni antara keadilan dan kepastian dalam pemilu serentak di Indonesia, dilakukan studi kasus yang melibatkan pemilihan umum terkini di Indonesia. Data primer akan dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, seperti penyelenggara pemilu, lembaga pemantau, partai politik, dan pemilih. Selain itu, data sekunder seperti laporan pemilihan umum, data statistik, dan dokumen-dokumen resmi akan digunakan untuk mendukung analisis.

**Analisis Kuantitatif dan Kualitatif:** Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif melibatkan penggunaan statistik untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data numerik, seperti persentase partisipasi pemilih, tingkat keluhan pemilu, atau hasil penghitungan suara. Analisis kualitatif melibatkan pengorganisasian, pemeriksaan, dan interpretasi data kualitatif, seperti transkrip wawancara atau kutipan dari sumber-sumber utama. Pendekatan ini akan membantu dalam memahami nuansa, persepsi, dan pengalaman yang lebih mendalam terkait keadilan dan kepastian dalam pemilu serentak.

**Analisis Tematik:** Data yang diperoleh akan diolah menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan pola-pola dan tema-tema penting yang muncul dalam penelitian. Hal ini akan membantu dalam merangkum dan menggambarkan tantangan serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap harmoni atau ketegangan antara keadilan dan kepastian dalam pemilu serentak di Indonesia.

**Validitas dan Keandalan:** Upaya akan dilakukan untuk memastikan validitas dan keandalan temuan penelitian. Ini akan mencakup penggunaan triangulasi, yaitu membandingkan dan

mencocokkan temuan dari berbagai sumber dan metode untuk memverifikasi hasil penelitian. Selain itu, pemikiran kritis dan refleksi peneliti akan terus menerus diterapkan untuk meminimalkan bias dan memastikan interpretasi yang akurat.

Rekomendasi: Berdasarkan temuan penelitian, akan disusun rekomendasi kebijakan atau langkah-langkah perbaikan yang dapat meningkatkan keadilan dan kepastian dalam pemilu serentak di Indonesia. Rekomendasi ini dapat meliputi perbaikan sistem pemilu, peningkatan transparansi, perbaikan regulasi teknologi

### **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **3.1. Tantangan-Tantangan Keadilan dalam Pemilu Serentak di Indonesia Memengaruhi Integritas dan Representativitas Proses Demokratis**

Tantangan- tantangan keadilan dalam pemilu serentak di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap integritas dan representativitas proses demokratis. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam konteks ini termasuk praktik kecurangan pemilu, ketidaknetralan penyelenggaraan pemilihan, serta distribusi sumber daya yang tidak merata.

Praktik kecurangan pemilu, seperti money politics (Anjasuma et al., 2023), politik identitas, dan penggunaan kekuasaan yang tidak adil, dapat mengancam integritas pemilihan. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan dalam perolehan suara dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis. Selain itu, ketidaknetralan penyelenggaraan pemilihan (Thamrin et al., 2022), baik dalam bentuk kebijakan yang memihak atau manipulasi proses, dapat merusak integritas dan kredibilitas pemilu, sehingga mengurangi representativitas hasil pemilihan (Muhammad Saad, 2021).

Dampak dari tantangan-tantangan keadilan ini adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan sebagai mekanisme yang adil untuk menentukan wakil rakyat. Ketidakpuasan terhadap integritas pemilu dapat mengarah pada ketidakpartisipasian aktif dalam proses demokratis, termasuk penurunan partisipasi pemilih dan meningkatnya tingkat golput. Selain itu, ketidakpercayaan terhadap pemilihan juga dapat merusak ikatan sosial dan persatuan dalam masyarakat, mengancam stabilitas politik dan harmoni sosial.

Untuk memastikan integritas dan representativitas proses demokratis, perlu dihadapi tantangan-tantangan keadilan tersebut. Langkah-langkah penting yang dapat diambil meliputi penerapan aturan yang ketat, pengawasan yang independen dan transparan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu. Selain itu, perlunya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan dalam pemilihan juga tidak dapat diabaikan.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan keadilan dalam pemilu serentak di Indonesia, integritas dan representativitas proses demokratis dapat ditingkatkan. Hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan sebagai instrumen yang adil untuk menentukan perwakilan politik, menjaga stabilitas politik, dan mempromosikan kehidupan demokratis yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

### **3.2. Kepastian dalam Pemilu Serentak di Indonesia Dapat Dipertahankan Untuk Memastikan Keadilan dalam Perolehan Suara dan Penghitungan Hasil Pemilihan**

Dalam konteks pemilu serentak di Indonesia, mempertahankan kepastian sangat penting untuk memastikan keadilan dalam perolehan suara dan penghitungan hasil pemilihan. Kepercayaan publik terhadap integritas dan transparansi proses pemilu sangat bergantung pada upaya untuk menjaga kepastian ini. Salah satu langkah kunci untuk mempertahankan kepastian adalah dengan mengimplementasikan aturan yang jelas dan tegas terkait pemilu. Penyusunan dan penerapan undang-undang pemilu yang komprehensif dan transparan dapat memberikan kerangka kerja yang jelas bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemilihan. Hal ini meliputi aturan yang mengatur proses pendaftaran pemilih, pelaksanaan kampanye, penghitungan suara, dan penyelesaian sengketa pemilihan.

Selain itu, penting untuk melibatkan lembaga pengawas independen dalam pemilihan, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk memastikan pemenuhan aturan dan integritas pemilu. Keberadaan lembaga-lembaga ini dapat memantau dan mengawasi jalannya pemilihan, mengatasi pelanggaran, dan menyelesaikan sengketa dengan adil dan transparan (Triono, 2018). Penggunaan teknologi juga dapat membantu mempertahankan kepastian dalam pemilu serentak. Penggunaan sistem pemilu elektronik atau teknologi lainnya dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penghitungan suara serta meminimalkan risiko manipulasi hasil pemilihan. Namun, penggunaan teknologi juga harus diiringi dengan langkah-langkah yang memadai untuk menjaga privasi dan keamanan data pemilih.

Dengan menjaga kepastian dalam pemilu serentak di Indonesia, keadilan dalam perolehan suara dan penghitungan hasil pemilihan dapat terjamin. Hal ini akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pemilihan dilakukan secara adil dan transparan, yang pada gilirannya akan memperkuat legitimasi pemerintah yang terpilih dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokratis.

### **3.3. Pemenuhan Keadilan dalam Pemilu Serentak di Indonesia dapat Memengaruhi Partisipasi Pemilih dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Proses Demokratis**

Pemenuhan keadilan dalam pemilu serentak di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi pemilih dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis. Ketika keadilan terjaga, partisipasi pemilih cenderung meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan juga meningkat. Salah satu faktor penting yang memengaruhi partisipasi pemilih adalah keyakinan bahwa pemilihan akan dilakukan secara adil dan setiap suara memiliki nilai yang sama. Jika pemilih percaya bahwa pemilu akan memastikan perolehan suara yang adil, mereka cenderung lebih termotivasi untuk berpartisipasi dan menggunakan hak suara mereka. Sebaliknya, jika terdapat ketidakadilan atau praktik kecurangan yang meragukan, hal itu dapat menurunkan motivasi pemilih untuk berpartisipasi karena mereka merasa bahwa suara mereka tidak akan diperhitungkan dengan adil.

Selain partisipasi pemilih, pemenuhan keadilan juga memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis secara keseluruhan. Jika pemilu dianggap adil dan transparan, masyarakat cenderung memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap lembaga-lembaga

demokrasi dan sistem politik secara umum. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas politik dan membangun legitimasi pemerintahan yang terpilih (Sinaga, 2021).

Namun, jika terdapat ketidakpuasan terhadap pemenuhan keadilan dalam pemilu, partisipasi pemilih dapat menurun dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis dapat terkikis. Pelanggaran etika dalam pemilihan, ketidaknetralan penyelenggaraan, dan keraguan terhadap integritas pemilihan dapat menghasilkan rasa skeptisisme dan ketidakpercayaan yang berdampak negatif pada partisipasi dan legitimasi proses demokratis.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan pemenuhan keadilan dalam pemilu serentak di Indonesia. Hal ini melibatkan penerapan aturan yang adil dan transparan, pengawasan yang independen, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan dalam pemilihan. Dengan demikian, partisipasi pemilih dapat ditingkatkan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis dapat dipertahankan, menjaga kestabilan politik dan kelangsungan demokrasi di Indonesia.

#### **4. Kesimpulan**

Tantangan-tantangan keadilan dalam pemilu serentak di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap integritas dan representativitas proses demokratis. Ketidakadilan dalam pemilihan, seperti adanya praktek kecurangan, distribusi sumber daya yang tidak merata, atau ketidaknetralan penyelenggaraan pemilu, dapat merusak integritas pemilihan dan mengurangi representativitas hasil pemilihan. Ketika pemilih merasakan adanya ketidakadilan, mereka mungkin kehilangan kepercayaan terhadap sistem demokrasi dan meragukan legitimasi pemerintahan yang dihasilkan dari pemilihan tersebut. Untuk memastikan keadilan dalam perolehan suara dan penghitungan hasil pemilihan, kepastian dalam pemilu serentak di Indonesia harus dipertahankan. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam pengawasan pemilihan, pemantauan penghitungan suara, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Dengan menjaga kepastian dalam pemilihan, termasuk perlindungan terhadap integritas sistem pemilihan, dapat dipastikan bahwa suara setiap pemilih dihargai dan hasil pemilihan mencerminkan kehendak rakyat dengan adil.

Pemenuhan keadilan dalam pemilu serentak di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi pemilih dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis. Jika pemilih merasa bahwa hak-hak mereka tidak dihormati atau adanya ketidakadilan dalam pemilihan, mereka mungkin kehilangan motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan pemenuhan keadilan yang tinggi dalam pemilu serentak, termasuk perlakuan yang sama bagi setiap pemilih, kebebasan untuk menyuarakan pilihan politik (Pradana et al., 2022), dan jaminan bahwa suara mereka akan dihitung dengan benar. Dengan demikian, partisipasi pemilih dapat ditingkatkan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis dapat diperkuat.

Untuk mengatasi tantangan keadilan dalam pemilu serentak di Indonesia, perlu adanya komitmen yang kuat untuk memperkuat integritas dan representativitas proses demokratis. Reformasi kebijakan pemilu yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dapat membantu mengatasi tantangan tersebut. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan dalam pemilihan juga penting untuk memperkuat partisipasi pemilih dan membangun kepercayaan yang kuat terhadap proses demokratis. Dengan demikian, pemilihan serentak di Indonesia dapat menjadi wahana yang adil, inklusif, dan representatif bagi semua warga negara.

## Referensi

- Anjasuma, R., Putra, D. A., & Pradana, S. A. (2023). Praktik Mahar Politik Dalam Partai Politik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Dan Kajian Fiqih Siyasah. *El-Dusturie*, 2(1).
- Dewi, N. T. R. (2019). Pengaruh Pemilu Serentak Di Indonesia. *Seminar Nasional I Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 226–274.
- Fahmi, K. (2016). Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945. *JURNAL CITA HUKUM*, 4(2). <https://doi.org/10.15408/Jch.V4i2.4098>
- Faiza, L. (2019). STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PKS PADA PEMILIHAN UMUM (PEMILU) TAHUN 2019 DI KOTA PEKANBARU. *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)*, 2(2), 140–151. <https://doi.org/10.36341/Jdp.V2i2.946>
- Frenki. (2016). Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 57.
- Haris Zulkarnain, M., & Saufi, A. (2021). URGENSI PENDIDIKAN PEMILIH MUDA MENUJU PEMILIHAN UMUM 2024 YANG BERINTEGRITAS. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3(2), 154–173. <https://doi.org/10.55108/Jbk.V3i2.262>
- Manurung, H. (2019). PENGARUH PEMILU SERENTAK TERHADAP RETURN SAHAM DI INDONESIA (Studi Kasus Saham LQ-45 Di Bursa Efek Indonesia). *Journal For Business And Entrepreneur*, 3(1), 12–28.
- Muhammad Saad, D. F. S. (2021). KEADILAN DALAM PEMILU BEDASARKAN SISTEM PRESIDENSIAL THRESHOLD. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(1), 15–37. <https://doi.org/10.37631/Widyapranata.V3i1.268>
- Pradana, S. A., Sudirman, R., & Alvian, Muh. A. (2022). Kemelitan Penegakan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 20(1), 156–168.
- Sinaga, M. (2021). Politik Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu Demi Mewujudkan Keadilan Pemilu. *To-Ra*, 7(April), 89–104.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Sutopo, Ed.; 4th Ed.). Alfabeta.
- Susila Wibawa, K. C. (2019). Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia. *Administrative Law And Governance Journal*, 2(4), 615–628. <https://doi.org/10.14710/Alj.V2i4.615-628>
- Thamrin, A., Achmad, D., & Fachreza, A. R. (2022). Penindakan Atas Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Provinsi Sulawesi Selatan. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 1(1), 37–43.
- Triono, T. (2018). STRATEGI POLITICAL MARKETING PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014 DI PROVINSI LAMPUNG. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 14(1), 88–108. <https://doi.org/10.24042/Tps.V14i1.2899>